PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah tertuang dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) adalah merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di Kabupaten Cirebon oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Penyusunan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

2. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon secara berencana, terpadu, dan sistematis yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, memuat :

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Data Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) Raperda yang terdiri dari :

   a. 9 (sembilan) Raperda Inisiatif DPRD

   b. 15 (lima belas) Raperda Inisiatif Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) ditetapkan untuk jangka waktu Tahun 2017 berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Pengelolaan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) diarahkan agar program pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan Tugas Pembantuan (*medebewind)* serta kebutuhan masyarakat.

KEENAM : Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tersebut dijadikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) tahun berikutnya dengan skala prioritas utama.

KETUJUH : 1. Dalam keadaan tertentu dan dengan memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah dan *medebewind* serta kebutuhan masyarakat, program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Program Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) dapat diubah skala prioritasnya setelah disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon.

KEDELAPAN : Anggaran yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun 2017, melalui :

a. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang disusun di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

b. Anggaran Sekretariat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KESEMBILAN : Keputusan ini mula berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 6 Februari 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Nomor : 4 Tahun 2017
Tanggal : 6 Februari 2017

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan/ Penyelenggaraan Perizinan Terpadu	DPRD	
2.	Raperda tentang Investasi Di Kabupaten Cirebon	DPRD	
3.	Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	DPRD	
4.	Raperda tentang Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembangan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.	DPRD	
5.	**Raperda tentang Program Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian di Kabupaten Cirebon.**	**DPRD**	
6.	**Raperda tentang Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon.**	**DPRD**	
7.	**Raperda tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon**	**DPRD**	
8.	**Raperda tentang Program Gemar Membaca dan Belajar Agama.**	**DPRD**	
9.	**Raperda tentang Kawasan Tanpa asap Rokok**	**DPRD**	
10.	Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.	Pemda	
11.	Raperda tentang Penetapan Desa	Pemda	
12.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	Pemda	

13.	Raperda tentang Penggabungan PD.BPR di Kabupaten Cirebon.	Pemda	
14.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.	Pemda	
15.	Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.	Pemda	
16.	**Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.**	**Pemda**	
17.	**Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016.**	**Pemda**	
18.	**Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.**	**Pemda**	
19.	**Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.**	**Pemda**	
20.	**Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.**	**Pemda**	
21.	**Raperda tentang Rencana Detil Tata Ruang Kota Sumber.**	**Pemda**	
22.	**Raperda tentang Rencana Tata Ruang Dan Kawasan Strategis Kabupaten Cirebon.**	**Pemda**	
23.	**Raperda tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.**	**Pemda**	
24.	**Raperda tentang Perubahan Ketentuan Beberapa Pasal Dalam Perda yang mengatur Retribusi Daerah.**	**Pemda**	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MUSTOFA

USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**PENYELENGGARA PERIJINAN/ PENYELENGGARAAN PERIJINAN TERPADU**	1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang	Bahwa kewajiban pemerintah daerah menjamin iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum dan memelihara lingkungan hidup; Bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen	Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu bertujuan untuk : a. Mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien dan efektif sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; dan b. Memberikan informasi	Sasaran penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, meliputi : a. Mendorong tumbuhnya investasi di Daerah; b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di Daerah; c. Menghindari kesalahan prosedur serta penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan	Objek Perizinan : Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Ruang lingkup: Standar Pelayaan Perizinan Terpadu Ruang lingkup perizinan yang diselenggarakan oleh Badan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi bidang : a. Perkebunan;	Bahwa dalam rangka meningkat kan kualitas pelayanan publik di Daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerinta han yang baik, perlu diselenggara kan pelayanan terpadu di bidang perizinan Bahwa	Keberadaan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Terpadu merupakan penyempurnaan aturan-aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan di tingkat daerah. Bahwa Peraturan

		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).	pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum; Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaa	kepada penerima perizinan tentang ketentuan pengaturan tata laksana perizinan yang dilakukan oleh Badan.	izin dan non izin di Daerah; d. Sinkronisasi dan harmonisasi perizinan antar sektor antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan f. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik.		b. Perikanan; c. Kehutanan; d. Kesehatan; e. Perhubungan; f. Ketenagakerjaan; g. Perindustrian; h. Perdagangan; i. Pendidikan; j. Peternakan; k. Kebinamargaan; l. Pengairan; m. Energi dari sumber daya mineral; n. Komunikasi dan informasi; o. Penanaman modal; p. Penataan ruang; q. Lingkungan hidup; r. Pertanahan; s. Sosial; t. Koperasi; u. Pertanian; dan Ketahanan pangan	negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggar	Daerah ini diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi maupun pelayanan dengan lebih cepat dan efisien.

			n wewenang d dalam penyelenggaraa n perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya					apelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik; Bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi	

								dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas; Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan	

								penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.	

2.	**RAPERDA TENTANG INVESTASI DI KABUPATEN CIREBON**	1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 4737); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan	Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dengan memperhatikan keanekaragaman potensi daerah yang dapat menumbuhkan prakasa dan kreatifitas untuk menuju pemerintahan yang mampu meningkatkan penyediaan pembiayaan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan daerah perlu adanya pranata hukum yang	Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk : a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Terwujudnya Peraturan Daerah mengenai Investasi di Kabupaten Cirebon guna tercapainya kemanfaatan dalam bidang ekonomi, sosial dan lainnya.	Investor dan Pemerintah Daerah	Bentuk, Pengelolaan dan Pengawasan Investasi di Kabupaten Cirebon	Bahwa guna menggerakkan perekonomian daerah perlu diciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman investasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; Bahwa untuk menciptakan iklim usaha dan tata cara penanaman modal yang kondusif perlu diciptakan kepastian dalam berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal di	Peraturan Daerah mengenai investasi di Kabupaten Cirebon ini merupakan terjemahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998. Diharapkan Peraturan Daerah ini bisa menjadi patokan bagi investor dan Pemerintah Kabupaten di dalam penanaman investasi di wilayah Kabupaten Cirebon sehingga dapat meningkatn

		Lembaran Negara Nomor 4812).	baik. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna investasi pemerintah daerah serta untuk memberikan peluang dalam berinvestasi khususnya investasi langsung yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.					Kabupaten Cirebon.	ya kesejahteraan umum dan pertumbuhan ekonomi yang pesat.

3.	**RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan; 3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaa	- Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar. - bahwa	Perlindungan anak dan perempuan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan anak dan perempuan dari kekerasan dan diskriminasi, terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,	Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak bertujuan agar dapat terpenuhinya : a. non diskriminas; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup,	Perlindungan setiap anak dan perempuandari tindak kekerasan meliputiaspek: a. pencegahan; b. pelayanan dan pendampingan; c. reunifikasi; dan pemberdayaan.yang berada di ruang lingkup Kabupaten Cirebon	a. Hak dan Kewajiban Anak dan perempuan b. Tanggung jawab Pemerintah, masyarakat dan orang tua c. Perlindungan terhadap anak dan perempuan	Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak dan perempuan yang merupakan hak asasi manusia; Bahwa anak dan perempuan merupakan amanah yang perlu dilindungi, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat	Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan anak dan perempuan ini mengatur tentang perlindungan setiap anak dan perempuan di wilayah kabupaten cirebon, sehingga anak-anak dan perempuan yang ada harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan hak asasi nya

		n Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia; - bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan selama ini belum dilakukan secara optimal; - Bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak dan perempuan yang perlu mendapat	berakhlak mulia, dan sejahtera Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, adalah untuk: a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang; b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak: c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan	kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.			sebagai manusia seutuhnya; Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut,	

		Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu; 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;	perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dan perempuan	dan anak; memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan				maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi Pemerintah	

								Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Hak Asasi Manusi menyatakan bahwa, penegakan	

								dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah	

4.	**RAPERDA TENTANG PROSEDUR PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DARI PENGEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**	- Pasal 18 ayat 6 UUD Negara RI Tahun 1945; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria.	- Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas; - Dalam rangka berkelanjutan pengelolaan sarana, prasarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan penyerahan sarana,prasarana dan utilitas perumahan dari pengembang perumahan kepada Pemerintah Daerah.	- Mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman - Mewujudkan prasarana, sarana dan utilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggara an dan pengembang an kehidupan social,buday a dan ekonomi.	Prinsip penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan utilitas pada perumahan adalah keterbukaan,a kuntabilitas dan kepastian hokum.	- Objek prasarana ,sarana dan utilitas perumaha n adalah tanah yang digunaka n untuk pembangu nan perumaha n oleh perusahaa n pembangu nan perumaha n - Subjek prasarana ,sarana dan utilitas perumaha n adalah setiap orang atau badan hukum/b adan usaha yang	1. Prasarana : - Jaringan jalan; - Jaringan saluran pembuanga n air limbah; - Jaringan saluran pembuanga n air hujan; - Tempat pembuanga n sampah. 2.Sarana : - Sarana perniagaan / Perbelanjaa n; - Sarana pelayanan umum dan pemerintah an; - Sarana pendidikan; - Sarana kesehatan; - Sarana	a. Banyaknya usaha di bidang perumahan, menginspirasi Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah, melalui perda ini maka ada ketentuan yang mengikat bahwa pengembang wajib menyerahkan fasum dan fasosnya kepada Pemerintah Daerah, kemudian	- Prasarana, sarana dan utilitas yang telah disesuaika n kepada Pemerinta h Daerah dikelola Pemerinta h Daerah sesuai peraturan perundang -undangan yang berlaku; - Pemanfaat an dan pengelolaa n prasarana, sarana dan utilitas tidak boleh mengubah fungsi/per untukan dan status kepemilika n; - Pemerinta h dapat bekerjasa

						melakukan pembangunan	peribadatan; - Sarana rekreasi dan olahraga; - Sarana parkir. 3.Utilitas : - Jaringan air bersih; - Jaringan listrik; - Jaringan telepon; - Jaringan gas; - Jaringan transportasi; - Jaringan pemadam kebakaran.	Pemerintah Daerah nanti yang akan memelihara nya. Dan akan diberikan sanksi bila tidak menjalankan peraturan tsb.	ma dengan pengembang , badan usaha swasta dan atau masyarakat dalam hal pengelolaan prasarana, saranadan utilitas perumahan yang telah diserahterimakan

5.	**RAPERDA TENTANG PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PERTANIAN DI KABUPATEN CIREBON**	1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. UU No 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman 5. UU No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	Bahwa petani sebagai pelaku utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan	1. Memberikan perlindungan kepada petani di Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan ketahanan pangan 2. Memberdayakan aspek pertanian di Kabupaten Cirebon	1. Memberikan perlindungan kepada petani di Kabupaten Cirebon 2. Mewujudkan ketahanan pangan 3. Memberdayakan petani di Kabupaten Cirebon	Petani di Kabupaten Cirebon	Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan pertanian meliputi : 1. Perencanaan 2. Perlindungan petani 3. Pemberdayaan petani 4. Pembiayaan dan pendanaan 5. Pengawasan Peran serta masyaraka	Program ketahanan pangan merupakan amanat UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Oleh karena itu penting untuk melakukan perlindungan dan pemberdayaan pertanian di Kabupaten Cirebon demi terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan.	Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan pertanian meliputi : 1. Perencanaan 2. Perlindungan petani 3. Pemberdayaan 4. Pembiayaan dan pendanaan 5. Pengawasan 6. Peran Serta Masyarakat

6.	**RAPERDA TENTANG PROMOSI DAN PENGISIAN PNS DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL DALAM LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON**	1. UU No, 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	Bahwa pengangkatan Jabatan Struktura ldan fungsional harus dilakukan secara obyektif, selektif dan transparan sehingga akan menumbuhkan kompetisi dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	1. Memberikan kejelasan pola karier PNS dan Pegawai lainnya 2. Memberikan transfaransi rekrutmen jabatan structural dan fungsional sesuai dengan kompentensi	1.memberikan kejelasan system pola karier PNS dan pegawai lainnya sesuai dengan kopemtensi jabatan di Kab Cirebon 2. Memberikan transfaransi persyaratan pengangkatan pemindahan dan pemberhentian dari jabatan structural	PNS dan Pegawai lainnya	Ruang lingkup Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari jabatan structural dan fungsional	Promosi dan Pengisian PNS Dalam Jabatan Struktural dan Fungsional Dalam Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten Cirebon sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilakukan secara terbuka dan adil	Jangkauan dan Arah Pengaturan mekanisme pengangkatan pemindahan dan pemberhentian 1. Jabatan Struktural Pejabat Tinggi Pratama dan jabatan administrasi 2.Jabatan Fungsional

7.	**RAPERDA TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIREBON**	1. UU Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan 2. UU nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokoler 3. UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 5. UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD 6. UU Nomor 1 Tahun 2004	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu pengaturan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon	Perda ini bertujuan agar anggota DPRD masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan demokrasi.	Perda ini diperuntukkan untuk Anggota DPRD di dalam menjalankan fungsi protokoler dan keuangan	Anggota DPRD Kabupaten Cirebon	Ruang lingkup Perda : 1. Kedudukan protokoler anggota DPRD 2. Belanja pimpinan dan anggota DPRD 3. Belanja penunjang kegiatan DPRD 3. Pengelolaan keuangan DPRD	Terbangunnya pemerintahan yang bersandar pada hukum dalam rangka tata pemerintahan yang baik (good governance)	1. Kedudukan protokoler anggota DPRD 2. Belanja pimpinan dan anggota DPRD 3. Belanja penunjang kegiatan DPRD 4. Pengelolaan keuangan DPRD

		Tentang Perbendaharaan Negara 7. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah							

8.	**RAPERDA TENTANG PROGRAM GEMAR MEMBACA DAN BELAJAR AGAMA**	1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 4. UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 5. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Bahwa membaca memiliki nilai positif bagi perkembangan kecerdasan dan dengan kecerdasan akan terbentuk kemampuan untuk menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. bahwa budaya gemar membaca harus ditumbuhkan dalam masyarakat dengan demikian sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jaman;	Perda ini bertujuan agar masyarakat di Kabupaten Cirebon khususnya anak-anak dapat gemar membaca dan belajar agama demi terwujudnya generasi muda yang memiliki pengetahuan luas dan berakhlakul karimah.	1. Sekolah di Kabupaten Cirebon 2. Universitas Lingkungan Masyarakat	Generasi muda di Kabupaten Cirebon	Ruang Lingkup Program Gemar Membaca dan Belajar Agama meliputi : 1. Perencanaan Program 2. Pengorganisasian 3. Pendanaan 4. Pelaksanaan 5. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Bahwa gemar membaca dan Belajar Agama harus diwujudkan demi terciptanya Generasi Muda yang Cerdas, Memiliki Pengetahuan dan Berakhlaq. Hal ini merupakan tanggung jawab Negara dalam bidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945	

9.	**RAPERDA TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK**	1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 3. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah	1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok 2. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia dan asap rokok tidak	1. Menciptakan lingkungan sehat. 2. Menciptakan manusia yang sehat dan produktif	1. Lingkungan Pendidikan 2. Lingkungan perkantoran 3. Lingkungan Kesehatan Lingkungan Masyarakat	Masyarakat di Kabupaten Cirebon	Ruang lingkup Perda Kawasan Tanpa Asap Rokok meliputi : 1. Norma 2. Pengawasan 3. Peran Serta Masyarakat 4. Penegakan Hukum dan Ketentuan Sanksi	Bahwa demi terciptanya lingkungan yang sehat dan manusia yang produktif, haruslah dibuat satu aturan mengenai kawasan tanpa asap rokok. Sehingga perokok aktif tidak menggagu hak-hak dari perokok pasif.	Larangan merokok; Ruang lingkup; Pengawasan; Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan; Peran serta masyarakat; Kerjasama luar negeri; Ketentuan Pidana; Ketentuan Umum; Ketentuan penutup

			hanya membayahakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain ; 3. bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok ;						

USULAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2017

NO	JUDUL RAPERDA	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG	TUJUAN	SASARAN	OBJEK	RUANG LINGKUP	POKOK PIKIRAN	JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN**	1. Undan-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan	Bahwa lahan pertanian pangan di Kabupaten Cirebon semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan,dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan	Menjamin terselenggaranya dan ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan, untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.	Menjamin adanya sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.	Bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan holtikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan	Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi: a. Penetapan; b. Pengembangan; c. Pemanfaatan; d. Pembinaan; e. Pengendalian; f. Pengawasan; g. Perlindungan dan pemberdayaan; h. Pembiayaan; i. Peran serta masyarakat.	Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh penataguna an lahan dan pemanfaatan lahan dengan sebaik-baiknya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	a. Ketentuan umum memuat rumusan academia mengenai pengertian istilan dan frasa; b. Materi yang akan diatur; c. Ketentuan sanksi; d. Ketentuan peralihan.

		Pertanian Pangan Berkelanjutan; 4. Perda Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031	pangan nasional.					(PLP2PB). Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji implementasi UU tersebut dalam mendukung ketahanan pangan. Terdapat tujuh simpul kritis dalam implementasi UU No.41Tahun 2009 mendukung ketahanan pangan yang mencakup: 1. Dukungan Peraturan Daerah; 2. Pemahaman terhadap karakteristik sumberdaya lahan pertanian; 3. Identifikasi tipe	

							lahan berdasarkan jenis irigasi dan kelas lahan; 4. Struktur penguasaan lahan pertanian; 5. Fenomena alih fungsi lahan yang semakin tidak terkendali; 6. Perpecahan dan perpancaran lahan; 7. Pentingnya pengembangan pusat informasi. Oleh karena itu,perlu adanya peraturan daerah yang secara legal dan formal yang mengatur hingga	

							teknis pelaksanaan dan tindak lanjut operasionalisasi di lapangan. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur secara teknis implementasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maka penyediaan lahan untuk pertanian menjadi lebih terjamin, fenomena alih fungsi lahan semakin terkendali, serta dukungan program-program pembangunan	

									pertanian dapat difokuskan pada kawasan tersebut, sehingga secara tidak langsung berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan secara nasional.	

11.	**RAPERDA TENTANG PENETAPAN DESA**	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri	Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, sehingga diperlukan penetapan desa-desa dalam wilayah Kabupaten Cirebon.	- Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI - Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. - Mendorong prakarsa bahwa gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahtera	Memenuhi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan	Desa di Kabupaten Cirebon	Penetapan desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon yang telah memperoleh kode dari Pemerintah Pusat	Penetapan desa yang telah ada merupakan suatubentuk pengakuan secara formal dan memudahkan bagi Pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah dalam merumuskan kebijakan berkaitan kedesaan	a. Ketentuan umum memuat rumusan academia mengenai pengertian istilan dan frasa; b. Materi yang akan diatur berupa penetapan desa- desa yang tercantum dalam lampiran

		Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan		an bersama. - Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.						

12.	**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011-2031.**	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035; 3. Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	adanya penambahan luasan wilayah Kabupaten Cirebon dan rencana proyek strategis nasional yang terdapat di Kabupaten Cirebon yang belum tercantum dalam tata ruang.	memberikan kepastian hukum perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Cirebon	tersusunnya perubahan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten Cirebon	wilayah Kabupaten Cirebon	a. ruang lingkup wilayah administrasi; b. luas dan batas administrasi; c. posisi geografis; dan lingkup substansi	Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2011- 2031 untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan pengaturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.	a. ketentuan umum; b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah; c. rencana struktur ruang wilayah; d. rencana pola ruang wilayah; e. penetapan kawasan strategis kabupaten; f. arahan pemanfaatan ruang wilayah; g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan h. kelembagaan dan peran serta

								Lebih lanjut memperhatikan dinamika yang muncul di SKPD dan masyarakat yang belum terakomodasikan kebutuhan oleh beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031, maka penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah	masyarakat;

								Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Renana Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 mutlak dilakukan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan sekaligus menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon.	

13.	**RAPERDA TENTANG PENGGABUNGAN PD. BPR DI KABUPATEN CIREBON**	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang	1. Hasil Kajian Akademis dan Kajian Teknis tentang Merger/Konsolidasi PD. BPR Kabupaten Cirebon dengan hasil bahwa Penggabungan PD. BPR di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu upaya penguatan struktur perbankan yang sehat termasuk Bank Perkreditan Rakyat oleh karena itu merger merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten	Untuk meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi PD.BPR serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan	optimalisasi cakupan pelayanan PD.BPR dengan efisiensi biaya operasional perusahaan	PD.BPR di Kabupaten Cirebon	penggabungan PD.BPR ini meliputi maksud dan tujuan, kedudukan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, modal dasar, dewan pengawas, direksi, kepegawaian, aset	PD.BPR selaku BUMD yang bergerak dalam bidang perbankan memiliki fungsi untuk membantu pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dengan penggabungan ini, diharapkan dapat mendorong efektifitas operasional PD.BPR sehingga dapat berkompetisi dengan perbankan swasta dan nasional.	1. Ketentuan Umum 2. Maksud Dan Tujuan Penggabungan 3. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Pd Bpr Cirebon 4. Struktur Organisasi Dan Kekayaan 5. Modal 6. Kewenangan Pemilik 7. Dewan Pengawas 8. Direksi 9. Pegawai 10. Pengelolaan Barang / Inventaris 11. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 12. Ketentuan Peralihan Ketentuan Lain

		Perusahaan Daerah Bank Perekreditan Rakyat di kabupaten Cirebon, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Cirebon; 4. Peraturan	Cirebon agar mempunyai BPR yang sehat sedangkan teknisnya dibagi menjadi 2 PD BPR yaitu PD BPR Tunggal Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon dan PD BPR Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon Ada beberapa PD BPR yang makin menurun kondisinya, dimana solusi terbaik adalah merger						

		Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan							

14.	**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA/KELURAHAN.**	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya; Peraturan Menteri Sosial nomor : 77/huk/ 2010 Tentang Pedoman dasar karang taruna	1. Penyesuaian ketentuan masa bhakti berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Sosial nomor : 77/huk/ 2010 Tentang Pedoman dasar karang taruna; 2. Perubahan persyaratan pengangkatan pengurus RT/RW di tingkat Desa/Kelurahan, hal ini dilakukan karena dalam mengangkat pengurus RT/RW menemui kesulitan dengan tingkat	memberikan kepastian hukum dalam pengangkatan pengurus dan masa bhakti lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan khususnya Karang Taruna dan RT/RW	penyesuaian masa bhakti pengurus Karang Taruna dan persyaratan pengangkatan pengurus RT/RW	kepengurusan Karang Taruna dan RT/RW	perubahan atas: 1. Masa bhakti kepengurusan karang taruna; 2. Persyaratan pendidikan pengurus RT/RW	Bahwa keberadaan lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu upaya meningkatkan pembangunan di desa dan Kelurahan, diperlukan adanya peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam merencanakan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan	

			pendidikan SMP. Selain itu pula kepengurusan RT/RW lebih kepada hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, sehingga latar belakang pendidikan tidak terlalu berpengaruh						

15.	**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**	1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; 2. PP Nomor 43 Tahun 2014 jo PP No.47 Tahun 2015; 3. Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang pemiliha Kepala desa; 4. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015	1. Hasil klarifikasi gubernur Jawa Barat terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan BPD; 2. Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 128/PUU-XIII/2015, tentang pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terutama pasal tentang persyaratan calon kepala desa dan perangkat desa; 3. Peraturan	tersusunnya pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD yang telah disesuaikan dengan produk hukum terbaru dan evaluasi pelaksanaan pemilihan kuwu serentak tahun 2015	penyelenggaraan pemerintah desa dan BPD yang tertib peraturan perundang-undangan	Kuwu,Perangkat Desa dan BPD	perubahan beberapa ketentuan mengenai pelaksanaan pemilihan kuwu serentak, pengangkatan dan pemberhentian kuwu, perangkat desa dan BPD.	Pemerintah Desa dan BPD merupakan pelaksana pemerintahan desa yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus berjalan bersinergi. Penyelenggaraan pemilihan kuwu yang luber dan jurdil berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang partisipatif.	1. Perubahan ketentuan umum; 2. Jadwal tahun pelaksanaan pemilihan kuwu serentak; 3. Susunan dan tugas Tim penyelenggara pemilihan kuwu serentak; 4. Persyaratan calon kuwu, DPT, mekanimse pengajuan keberatan, biaya pemilihan kuwu, surat suara, 5. Pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap kuwu; 6. Penjabat kuwu; 7. Pemilihan kuwu antar waktu;

			menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa; 4. Hasil evaluasi pelaksanaan pemilihan kuwu serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015						Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

16.	**RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.	1. Pengelolaan barang milik daerah yang semakin kompleks, perlu dikelola secara optimal; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006	Agar pengelolaan barang milik daerah dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel	Tertib pengelolaan barang milik daerah	Barang milik daerah	1. Pejabat pengelola barang milik daerah; 2. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 3. Pengadaan; 4. Pengguna n; 5. Pemanfaatan; 6. Pengamanan dan pemeliharaan; 7. Penilaian; 8. Pemindah tanganan; 9. Pemusnahan; 10. Penghapusan; 11. Penatausahaan; 12. Pembinaan; 13. Pengawasan dan pengendalian; 14. Pengelolaan BMD pada	Untuk meningkatkan pengelolaan barang daerah, perlu dibuat peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah	

			tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu disesuaikan.				SKPD yang mengguna kan pola pengelolaa n keuangan BLUD; 15. BMD berupa rumah Negara; 16. Ganti rugi dan sanki; Pengelola an aset tak berwujud.		

17	**RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016.**	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, beserta perubahannya.	Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan	Memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan struktur APBD yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan	Pertanggungjawaban APBD berupa Laporan Keuangan yang memuat : a. Neraca; b. Laporan Realisasi Anggaran c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan	Penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Penyajian laporan keuangan yang memuat: a. Neraca; b. Laporan Realisasi Anggaran c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan

peraturan
daerah

18.	**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017.**	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, beserta perubahannya	Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga Pengelolaan perubahan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Memberikan dasar hukum bagi perubahan pengalokasian penganggaran pengeluaran dan penerimaan dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pendelegasian dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Penetapan perubahan anggaran sesuai dengan struktur APBD yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan	Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan struktur sebagai berikut: a. Pendapatan; b. Belanja; c. Pembiayaan.	Penyusunan raperda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	

19.	**RAPERDA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018.**	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, beserta perubahannya	Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, sehingga Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah	Memberikan dasar hukum bagi pengeluaran dan penerimaan anggaran dalam menjalankan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pendelegasian dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat.	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	Penetapan pengalokasian anggaran sesuai dengan struktur APBD yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan	Anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan struktur sebagai berikut: a. Pendapatan; b. Belanja; c. Pembiayaan.	Penyusunan raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	

20.	**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**	1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-IX/2011; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:188.34-6305 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2011 tentang	1. Penyesuaian terhadap aturan2 dan kebijakan pusat 2. Adanya Potensi pajak yang belum tergali.	- Memperluas obyek beberapa jenis pajak daerah; - perubahan tarif beberapa pajak daerah; - perubahan pengaturan tentang pajak reklame	Meningkatnya pendapatan asli daerah dari yang bersumber dari pajak daerah	Beberapa jenis pajak daerah	Perubahan terhadap pengaturan pajak daerah yang terdiri dari: a. pajak restoran; b. pajak hotel; c. pajak hiburan; d. BPHTB; e. Pajak penerangan jalan; f. Pajak mineral bukan logam; g. Pajak reklame; h. Pajak parkir.	Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. penerimaan pajak belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap APBD.penggalian potensi pajak di daerah, penegakan peraturan daerah tentang pajak masih memerlukan peningkatan. Harapan terhadap meningkatnya kontribusi dari sektor pajak daerah terhadap APBD tentunya tetap memperhati	1. Perubahan dan penambahan beberapa definisi dalam ketentuan umum; 2. Perubahan pasal-pasal yang mengatur tentang: a. pajak restoran; b. pajak hotel; c. pajak hiburan; d. BPHTB; e. Pajak penerangan jalan; f. Pajak mineral bukan logam; g. Pajak reklame; h. Pajak parkir.

		Pajak Daerah.						kan nilai-nilai keadilan, kepatutan dalam masyarakat.	

21.	**RAPERDA TENTANG RENCANA DETIL TATA RUANG KOTA SUMBER**	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	RDTR adalah rencana terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan, serta dalam rangka operasional pemanfaatan lahan. RDTR merupakan penjabaran dari rencana umum tata ruang wilayah kabupaten kedalam rencana pemanfaatan ruang kawasan perkotaan/kawasan strategis kabupaten.	Tujuan RDTR adalah sebagai panduan pemerintah kabupaten Cirebon dalam mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan tersebut, khususnya perizinan bagi penduduk dalam memanfaatkan ruang dan mendirikan bangunan.	1. Teridentifikasinya kondisi eksisting pemanfaatan ruang sekitar kota sumber; 2. Tersususnya konsep arahan dan strategi pengembangan kota sumber; 3. Tersusunya RDTR Kota sumber; 4. Tersusunya peraturan zonasi pada kawasan prioritas.	Kecamatan Sumber	RDTR skala 1:500	Kota sumber sebagai ibukota Kabupaten Cirebon, agar segera dibentuk RDTR sebagai alat pengarah pengembangan wilayah	Diarahkan untuk kawasan pusat pemerintahan dan pendidikan tinggi.

22.	**RAPERDA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN (KSK) PLUMBON**	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2. Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031.	RDTR Kawasan strategis kabupaten (KSK) kepentingan pertumbuhan ekonomi kawasan plumbon dalam konteks kabupaten Cirebon ke dalam kawasan strategis kabupaten sesuai kepentingan pertumbuhan ekonomi. Dengan ditetapkannya kawasan strategis kabupaten di dalam RTRW Kabupaten Cirebon, maka harus segera disusun RTR kawasan strategis kabupaten (KSK) Plumbon	Menyusun materi pengaturan zonasi (zoning regulation) kawasan strategis kabupaten (KSK) Plumbon yang dapat dijadikan panduan pemerintah kabupaten Cirebon dalam mengenakan pemanfaatan ruang kawasan tersebut.	1. Teridentifikasinya kondisi eksisting pemanfaatan ruang sekitar kawasan strategis kabupaten (KSK) Plumbon 2. Tersusunya potensi dan permasalahan kawasan strategis kabupaten (KSK) kepentingan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan plumbon sebagai dasar untuk penyusunan rencana dan peraturan zonasi.	Kec.Plumbon	RTR 1:50.000	RTR Plumbon merupakan kawasan strategis pengembangan ekonomi di Kabupaten Cirebon yang memiliki tingkat pertumbuhan wilayah yang tinggi (cepet tumbuh) sehingga perlu diantisipasi pengembangan wilayah di masa mendatang dengan dibuat perda tentang rencana tata ruang.	Diarahkan untuk kawasan pengembangan ekonomi (industry pusat perdagangan dan jasa)

23	**RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014	Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah secara terpadu telah menjadi prasyarat yang penting untuk mencapai good governance dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kepemerintahaan guna memperbaiki pelayanan public, serta meningkatkan efisiensi pelaksanaan otonomi daerah	Diharapkan dapat muncul pemahaman bersama bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi di kabupaten Cirebon wajib dilakukan demi efektifitas dan efisiensi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola kepemerintahan	• Terselenggaranya pemerintahan daerah kabupaten cirebon yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; • Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah; • Terlaksanaanya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi	Seluruh instansi di lingkup pemerintah daerah kabupaten cirebon	a. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di lingkup pemerintah kabupaten cirebon; b. Pengelolaan nama domain di lingkup pemerintah kabupaten cirebon; c. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	• Ketentuan umum; • Asas, maksud dan tujuan; • Ruang lingkup; • Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi dan informasi dan komunikasi (e-Government); • Pengelolaan domain; • Pengelolaan informasi dan komunikasi publik; • Kemitraan dan peran serta masyarakat	

					di lingkungan OPD yang menghasilkan pelayanan publik yang optimal; • Terlaksanaanya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tata laksana perencana, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan • Terwujudnya masyarakat kabupaten cirebon yang memiliki aksesibilitas			serta dunia usaha; • Pembinaan, pengawasam dan pengendalian; • Ketentuan pembiayaan; • Ketentuan peralihan	

					terhadap pengguna an teknologi informasi dan komunika si					

24.	**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA KETENTUAN PASAL YANG TERTUANG DALAM PERDA YANG MENGATUR RETRIBUSI DAERAH**	1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:188.34-6425 Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembatalan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2011	Adanya Pembatalan dari Menteri Dalam Negeri terhadap beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah						

		tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:188.34-6444 Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentua							

		n Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:188.34-6451 Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016							

		tentang Pembatalan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:1								

		88.34-6469 Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembatalan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri							

		Republik Indonesia Nomor:188.34-6471 Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembatalan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakai								

		an Kekayaan Daerah;							

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MUSTOFA